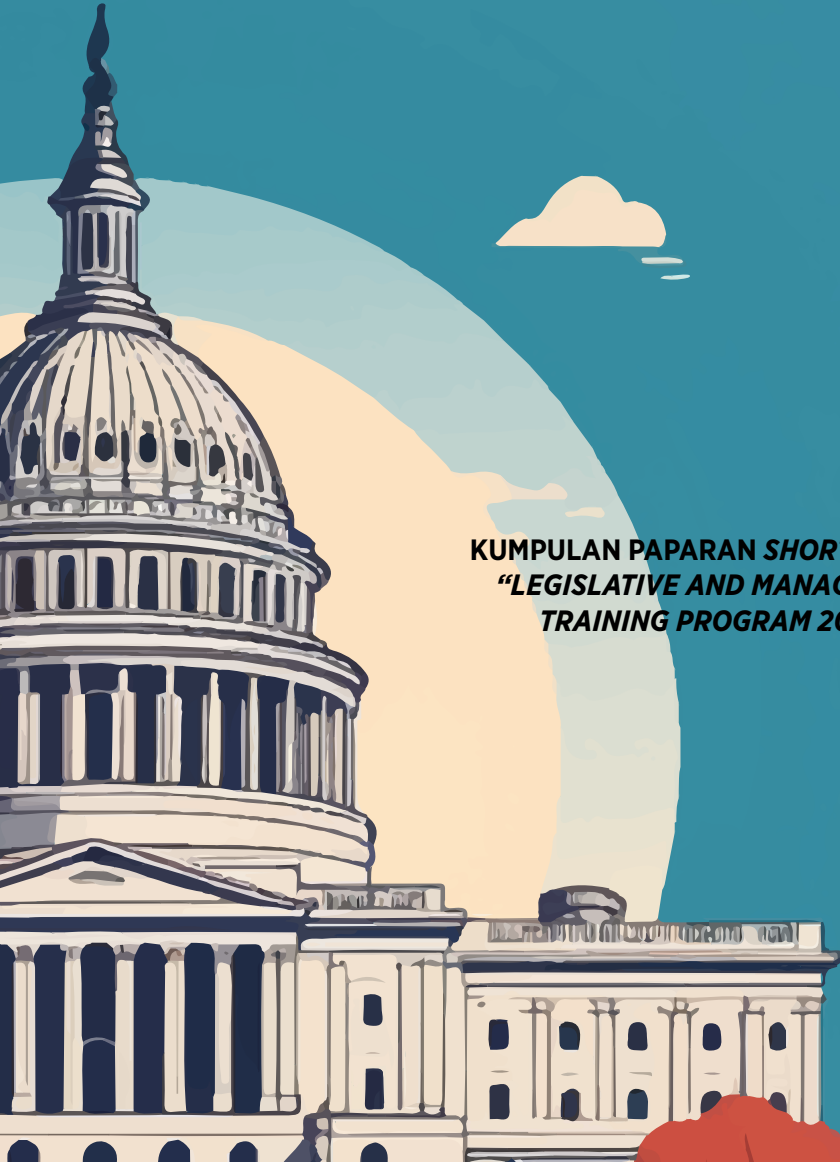




# KEPEMIMPINAN LEGISLATIF

## DAN DINAMIKA PARLEMEN: PROSES KEBIJAKAN DAN DEMOKRASI



**KUMPULAN PAPARAN *SHORT COURSE*  
“*LEGISLATIVE AND MANAGEMENT  
TRAINING PROGRAM 2023*”**





# **KEPEMIMPINAN LEGISLATIF DAN DINAMIKA PARLEMEN: PROSES KEBIJAKAN DAN DEMOKRASI**

**KUMPULAN PAPARAN *SHORT COURSE*  
“*LEGISLATIVE AND MANAGEMENT*  
*TRAINING PROGRAM 2023*”**

Penyunting:

**Yulia Indahri**

**KEPEMIMPINAN LEGISLATIF  
DAN DINAMIKA PARLEMEN:  
PROSES KEBIJAKAN DAN DEMOKRASI**

**KUMPULAN PAPARAN *SHORT COURSE*  
“*LEGISLATIVE AND MANAGEMENT*  
*TRAINING PROGRAM 2023*”**

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All rights reserved*

Perpustakaan Nasional  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
xiv + 124 hlm.; 14,5 x 21 cm

e-ISBN 978-602-8722-65-0 (PDF)  
September 2024

Penyunting:  
Yulia Indahri

Ilustrasi Sampul:  
Freepik

Tata Letak:  
Yulia Indahri

Diterbitkan oleh:  
Sekretariat Jenderal  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270  
Tlp./Faks. 021-571 5372

# Daftar Isi

Sambutan Kepala Pusat Analisis Keparlemenan .....	v
Sambutan Kepala Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional .....	vii
Kata Pengantar .....	xi
Introduction of the United States Congress and the Policymaking Process <i>Mark Harkins</i> .....	1
The Role of Interest Groups in the Policymaking Process <i>Barry Hager</i> .....	6
The Role of U.S. Congress in Foreign Policy and National Security <i>Walter Lohman &amp; Frank Jannuzi</i> .....	11
Challenges to Democracy in the United States and Globally Darrell West .....	14
The Political Origins of Bicameralism in the U.S. <i>J. Mitchell Pickerill</i> .....	19
The Role of the U.S. House of Representatives in the Legislation Process <i>Scot Schraufnagel</i> .....	34
Dampak <i>State Formation</i> terhadap Peran Lembaga Legislatif di Amerika Serikat dan Indonesia <i>Azriansyah A. Agoes</i> .....	47

The Evolution of Congressional Power and the Role of the Congressional Budget Office <i>Christopher B. Goodman</i> .....	63
Fundamentals of Forecasting <i>Scott E. Robinson</i> .....	75
The Evolution of State Legislative Power and the Role of the Legislative Budget Offices <i>Kurt Thurmaier</i> .....	91
Bibliografi .....	111
Epilog .....	113
Indeks .....	115
Biodata Penyunting.....	124

# **Sambutan**

## **Kepala Pusat Analisis Keparlemenan**

Di era demokrasi modern, peran legislatif yang diamanatkan kepada DPR RI sangatlah penting dalam pembentukan kebijakan dan representasi suara rakyat. Buku “Kepemimpinan Legislatif dan Dinamika Parlemen: Proses Kebijakan dan Demokrasi” disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan peran lembaga legislatif, khususnya dalam konteks Amerika Serikat dan Indonesia.

Dalam buku ini, para ahli dan akademisi terkemuka membahas berbagai topik yang mencakup proses pembentukan kebijakan di Kongres Amerika Serikat, peran kelompok kepentingan, hingga tantangan demokrasi di tingkat global. Setiap pemaparan menawarkan wawasan mendalam dan analisis tajam tentang bagaimana berbagai elemen dalam sistem legislatif bekerja dan berinteraksi satu sama lain.

Dengan menggabungkan perspektif dari dua negara dengan sistem politik yang berbeda, buku ini tidak hanya memberikan analisis komparatif yang kaya tetapi juga menggali dampak dari pembentukan negara terhadap peran lembaga legislatif di Amerika Serikat dan Indonesia. Diharapkan, buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana faktor-faktor historis dan struktural memengaruhi dinamika lembaga legislatif dan demokrasi.

Buku ini diharapkan menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, analis, serta praktisi yang tertarik dengan studi tentang lembaga legislatif, kebijakan publik, dan demokrasi. Harapannya, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dan dinamika proses yang berlangsung di lembaga legislatif serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sehat dan efektif.

Kami berharap buku ini dapat menginspirasi diskusi dan kajian lebih lanjut dalam bidang kepemimpinan legislatif dan demokrasi. Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan wawasan baru yang bermanfaat dalam memahami proses kebijakan dan demokrasi di era modern.

Jakarta, September 2024

A. Sani Alhusain, S.E., M.A.



# **Sambutan**

## **Kepala Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional**

Dengan segala puji syukur, kami mempersembahkan buku ini sebagai bagian dari upaya kami untuk mendokumentasikan Program *Short Course “Legislative and Management Training Program 2023”* yang telah diselenggarakan dengan penuh antusiasme dan semangat oleh para peserta. Program ini tidak hanya menarik tetapi juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam praktik di lembaga legislatif dan manajemen yang dilakukan oleh sistem pendukung lembaga legislatif.

Pelatihan ini mencakup berbagai topik penting yang disampaikan oleh para ahli dari Northern Illinois University (NIU) dan The Asia Foundation. Materi yang disampaikan dalam program ini sangat beragam, mulai dari pengenalan tentang Kongres Amerika Serikat, peran kelompok kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan, hingga tantangan demokrasi di tingkat global. Selain itu, pelatihan ini juga melibatkan sesi studi lapangan yang memberikan wawasan praktis kepada peserta. Selama 15 hari pelaksanaan pelatihan, peserta mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga memperluas jaringan profesional.

Kami berharap program ini dapat terus dilanjutkan di masa mendatang, mengingat pentingnya pelatihan seperti ini dalam mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia. Buku ini merupakan sebagian dari seluruh materi yang disampaikan selama program berlangsung. Akan ada buku lain yang diterbitkan sebagai lanjutan dari dokumentasi ini untuk memastikan bahwa seluruh materi yang berharga dapat diakses oleh lebih banyak pihak.

Evaluasi program yang telah dilakukan menunjukkan berbagai aspek yang perlu ditingkatkan. Beberapa catatan penting dari evalu-

asi antara lain adalah perlunya pendalaman materi tertentu, peningkatan interaksi antarpeserta, serta penyesuaian terhadap kebutuhan dan latar belakang peserta yang beragam. Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen untuk mempertimbangkan masukan dari evaluasi tersebut guna penyempurnaan program-program berikutnya. Misalnya, ada usulan untuk menambahkan materi tentang penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam proses legislasi, yang dianggap relevan dengan tren teknologi saat ini.

Kami juga ingin mengapresiasi semangat dan dedikasi para peserta yang telah mengikuti program ini dengan penuh antusiasme, diskusi hangat, dan kerja sama dari seluruh peserta program, yaitu:

- Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
- Ir. Sumariyandono, M.P.M.
- Drs. Helmizar, M.E.
- Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
- Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
- Endang Suryastuti, S.H., M.Si.
- Arini Wijayanti, S.H., M.H.
- Hernadi, S.IP, M.Si.
- M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.
- Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak.
- Dr. Anita Handayaniputri, S.T., M.T.
- Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
- Arif Usman, S.H., M.H.
- Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
- Mardisontori, S.Ag., LL.M.
- Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E.
- Khopiatuziadah, S.Ag., LL.M.
- Fariza Emra, S.T., M.Sc.

Semangat ini terlihat dari tingginya partisipasi dan komitmen dalam setiap sesi pelatihan, baik itu dalam diskusi kelompok, simulasi interaktif, maupun studi lapangan. Tidak ada satu pun peserta yang kehilangan semangatnya, bahkan banyak yang merasa terinspi-

rasi untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Pelatihan ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dan pertukaran pengetahuan. Kunjungan ke Capitol Hill dan berbagai instansi pemerintah di Amerika Serikat memberikan perspektif baru tentang praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia. Kami berharap, di masa mendatang, program ini dapat diperluas dengan mengundang peserta dari negara-negara lain di Asia atau Asia Tenggara untuk berbagi pengalaman dalam praktik demokrasi.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan program ini, terutama kepada NIU yang telah menyediakan tenaga pengajar berkualitas dan fasilitas yang mendukung keberhasilan program ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Selamat membaca.

Jakarta, September 2024

Endah T. D. Retnoastuti, S.S., M.Phil.



# Kata Pengantar

Izinkan kami mempersembahkan buku “Kepemimpinan Legislatif dan Dinamika Parlemen: Proses Kebijakan dan Demokrasi,” yang disusun berdasarkan diskusi pada saat mengikut program *Short Course “Legislative and Management Training Program 2023”*. Buku ini berisi paparan dari para ahli dan akademisi yang pakar di bidangnya. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam mengenai proses legislatif dan dinamika demokrasi, baik di Amerika Serikat maupun Indonesia. Kami menyadari bahwa ilmu dan pengetahuan yang kami peroleh selama mengikuti program singkat selama dua minggu di Amerika Serikat memiliki nilai yang sangat tinggi dan layak dibagikan kepada pembaca lain yang belum berkesempatan mengikuti pelatihan serupa.

Dalam proses penyusunan buku ini, kami berupaya untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan berimbang. Berbagai topik yang dibahas meliputi pembentukan kebijakan di Kongres Amerika Serikat, peran kelompok kepentingan, serta tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di tingkat global. Buku ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang luas dan mendalam tentang bagaimana sistem legislatif bekerja dan bagaimana berbagai elemen di dalamnya saling berinteraksi.

Kami menyadari pentingnya peran lembaga legislatif dalam pembentukan kebijakan dan representasi rakyat. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berusaha menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor historis dan struktural yang memengaruhi dinamika legislatif dan demokrasi di kedua negara. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga dapat menjadi bahan diskusi dan kajian lebih lanjut bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik dengan isu-isu legislatif dan demokrasi.

Mark B. Harkins, *Senior Fellow* di Government Affairs Institute di Georgetown University, membuka wawasan tentang proses pembuatan kebijakan di Kongres. Dengan latar belakang pengalaman panjangnya di Capitol Hill dan dalam dunia hubungan pemerintah, presentasinya

mencakup sejarah pembentukan pemerintahan, dari periode revolusi hingga penyusunan Konstitusi. Mark menjelaskan struktur kompleks Kongres yang sengaja diciptakan untuk mengatasi tantangan dan meminimalkan risiko munculnya pemimpin otoriter. Penekanan pada kehati-hatian dan bukan pada kecepatan atau keseimbangan kekuasaan antar-negara bagian menjadi ciri khas sistem AS.

Barry Hager, Presiden Hager Associates, menyampaikan paparan tentang peran kelompok kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan di Kongres. Barry Hager sebelumnya pernah bekerja di Kongres dan memiliki keahlian di bidang kebijakan perbankan, hubungan luar negeri, dan pembangunan ekonomi di AS, Eropa, dan Jepang. Sebelum mendirikan Hager Associates, beliau bekerja di Kongres selama tujuh tahun, termasuk sebagai kepala penasihat dan direktur subkomisi perbankan Dewan yang menangani pembangunan internasional dan keuangan. Hager menyoroti keterbukaan Kongres terhadap masukan dari berbagai kelompok, termasuk kelompok swasta yang sangat berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Walter Lohman, profesional Kantor Senator Dan Sullivan (R-Alaska), membahas peran Kongres dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Dengan pengalaman sebelumnya di The Heritage Foundation dan posisinya sebagai dosen tamu di Georgetown University, Lohman menyoroti hubungan antara eksekutif dan Kongres. Walter menyampaikan arti penting kerja sama dalam hal anggaran, kebijakan perdagangan, dan konfirmasi pejabat pemerintah.

Frank Jannuzi, Presiden dan CEO The Mike and Maureen Mansfield Foundation, melanjutkan diskusi Walter tentang peran Kongres dalam hubungan AS–Indonesia. Dengan latar belakangnya sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International, U.S., dan pengalaman di Senat Amerika dalam urusan Asia Timur dan Pasifik, Frank menyoroti peran konstituen dalam membentuk pandangan Kongres. Frank juga menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan untuk mendorong Kongres agar tetap memperhatikan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam hubungan ekonomi dan keamanan global.

Dr. Darrell West dari The Brookings Institution yang dalam paparannya membahas tantangan demokrasi, baik di AS maupun secara global. Darrell menyoroti disparitas ekonomi di AS, dimana sekitar 15 persen dari seluruh wilayah menghasilkan 72 persen produk domestik bruto (PDB). Akibatnya, 85 persen wilayah lain harus mengelola aktivitas ekonomi yang cukup terbatas. Hal ini mengakibatkan munculnya semangat populis dan ultra-nasionalis, yang juga ditemui di banyak negara lain.

Prof. J. Mitchell Pickerill, pakar ilmu politik, telah menjelaskan asal-usul sejarah bikameralisme, melihat akarnya yang dimulai pada abad pertengahan Inggris dan pengaruhnya terhadap konstitusi. Hubungan antara bikameralisme dan federalisme dieksplorasi, dengan penekanan pada bagaimana para perancang konstitusi berupaya melindungi kepentingan negara bagian dan pada saat yang sama membangun pemerintah pusat yang lebih kuat.

Prof. Scot Schraufnagel secara khusus memaparkan federalisme AS dan asal-usul politik bikameralisme di Kongres. Scot juga membahas secara khusus efektivitas institusional, dan menyampaikan paparan mengenai peran lembaga kongresional seperti *Congressional Research Services* (CRS), *Congressional Budget Office* (CBO), dan *General Accounting Office* (GAO), yang menonjolkan sifat non-partisan mereka untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan publik.

Azriansyah membahas dampak *state formation* terhadap peran lembaga legislatif di AS dan Indonesia. Beliau menjelaskan konsep *state formation*, perbandingan antara AS dan Indonesia, dan dampaknya terhadap lembaga legislatif. AS cenderung *legislative-heavy*, sementara Indonesia memiliki dominasi eksekutif dan lembaga legislatif hanya sebagai “*rubber stamp*”.

Christopher B. Goodman yang membahas evolusi kekuasaan legislatif AS dan peran CBO. Christopher menjelaskan bahwa sebelum tahun 1921, tidak ada proses anggaran yang terformalisasi di AS, dan setiap agensi berinteraksi langsung dengan dengan komisi Kongres terkait.

Prof. Scott E. Robinson membahas berbagai pendekatan dalam *forecasting*, dengan fokus pada keterampilan analisis. Melalui contoh sederhana, beliau menggambarkan tantangan *forecasting* permintaan layanan masyarakat tahun 2023 dengan menggunakan teknik *forecasting* untuk membuat prediksi berbasis bukti dan tetap memperhatikan peluang ketidakpastian.

Dan terakhir, presentasi Prof. Kurt Thurmaier mengenai evolusi fungsi lembaga legislatif di negara bagian AS, dimulai dari legislator yang kuat pada awal berdirinya negara hingga pelemahan setelah Perang Saudara dan Perang Korea. Pada tahun 1960-an, perubahan besar di bidang kesejahteraan sosial menjadi tekanan tersendiri bagi negara-negara bagian, dan pada tahun 1970-an dan 1980-an, terjadi desentralisasi ke negara bagian di bawah pemerintahan Nixon dan Reagan, yang mendorong pembentukan kantor fiskal legislatif untuk memberikan layanan analisis independen.

Kami berharap, melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas proses di lembaga legislatif dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sehat dan efektif. Buku ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian, pengajaran, serta dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik. Semoga buku ini juga dapat menginspirasi berbagai diskusi dan penelitian di bidang kepemimpinan legislatif dan demokrasi.

Jakarta, September 2024

Yulia Indahri



In the discussion, how federal funding, particularly in areas like healthcare and environmental programs, often reaches individuals through states acting as intermediaries. States can apply for grants from federal agencies like the Environmental Protection Agency to address water treatment or flood mitigation issues. The mention of the '60s and '70s highlights a shift from the money going directly to individuals in those decades to more recent times, where it often flows through states.

Draws a comparison between the equalization aid in Indonesia, distributed based on population and needs, and the U.S. system, where equalization in education funding is seen at the state level, addressing disparities between rich and poor school districts. This provides insights into the complexities of funding distribution mechanisms.

As the discussion opens to questions, the focus shifts to the power balance between the legislative and executive branches, particularly regarding the budget. Legislative leadership expressing a desire for more power is crucial. Drawing from the U.S. experience, organizations like the Congressional Budget Office emerged from politicians seeking evidence to counter executive narratives and ensure forecast accuracy and building demand for analytical services within the legislative framework, suggesting that members of parliament can request analyses from the Secretariat, creating a legitimate route for enhancing the demand for such services.

In collaboration efforts between the parliamentary budget office and universities, we are exploring the idea of strengthening knowledge and analysis for the members of parliament.

The conversation then transitions to the issue of budget allocation for the parliamentary budget, indicating that it is currently a very small fraction of the national budget. Collaborating with various experts, not just economists is important to analyze proposals effectively. They highlight the value of building networks and creating informal shadow forecasts to provide added value to legislators. The discussion touches on examples of successful collaborations, referencing the fiscal research center at Georgia State as a model.

The conversation then shifts to discussing budget autonomy for the legislative branch. There is a mention of the possibility of earmark-

ing a specific percentage from the national budget for the parliamentary budget's establishment. It emphasizes the importance of demand-driven budgets, where different arms of the legislature present their budget needs to the appropriations committee, drawing an analogy with managing a household budget.

On collaborative efforts, the challenges of budget allocation, and the importance of a demand-driven approach in budgeting for the parliamentary budget office. It begins by recounting an incident from 1976 where the sergeant suggests the need for more computers. They highlight the simplicity of the budget process at that time and the political check on extravagant spending, mentioning members of Congress who make symbolic gestures to showcase fiscal responsibility.

Tips on transitioning and suggests an incremental strategy. It is advised to focus on specific areas to establish expertise and credibility, providing targeted advice in areas like environmental policy or health. The idea is to prove the value of the parliamentary budget office's capabilities in small, targeted domains before expanding into broader areas.

# Bibliografi

- Congressional Budget Act of 1974, Pub. L. No. 93-344, 88 Stat. 297.* (1974).
- Ellis, J. J. (2002). *Founding brothers: The revolutionary generation.* Vintage.
- Federal Election Commission. (2010). *Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310.*
- Fedirka, A. (2018, Januari 9). *How instability in central America affects US-Mexico relations.* Geopolitical Futures. <https://geopoliticalfutures.com/instability-central-america-affects-us-mexico-relations/>
- Goodman, C. B. (2018). *The evolution of congressional power: A historical perspective.* Government Printing Office.
- Hager, B. (2012). *The unheavenly chorus: Unequal political voice and the broken promise of American democracy.* Princeton University Press.
- Jacobson, L. (2015, August 17). *Pie chart of 'federal spending' circulating on the Internet is misleading.* PolitiFact The Poynter Institute. <https://www.politifact.com/factchecks/2015/aug/17/facebook-posts/pie-chart-federal-spending-circulating-internet-mi/>
- Jannuzi, F. (2021). *U.S.-China relations: An introduction.* Asia Foundation.
- Kearney, M. S. (2014, January 14). *Income inequality in the United States: Trends and policy implications.* Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/income-inequality-in-the-united-states/>
- Kusnandar, V. B. (2022, April 19). *Proyeksi piramida penduduk Indonesia di era bonus demografi (2045).* KataData. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/waspada-bencana-demografi-ini-proyeksi-penduduk-ri-2045>
- Mayes, B. R., Blanco, A., Levitt, Z., & Mellnik, T. (2021, August 13). *America's demographics are changing. How has your country shifted?* *Washington Post.* <https://www.washingtonpost.com/na>

- tion/interactive/2021/census-maps-race-population-demographics/?itid=lk\_interstitial\_manual\_6
- McNichol, E. C. (2014, September 4). *Improving state revenue forecasting: Best practices for a more trusted and reliable revenue estimate*. Center on Budget and Policy Priorities. <https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/8-7-14sfp.pdf>
- Pickerill, J. M. (2004). *Constitutional deliberation in Congress: The impact of judicial review in a separated system*. Duke University Press.
- Rios, A-M., Bastida, F., & Benito, B. (2014). Budget transparency and legislative budgetary oversight: An international approach. *The American Review of Public Administration*, 46(5). <https://doi.org/10.1177/0275074014565020>
- Robinson, S. E. (2015). *Forecasting in public administration: Tools and techniques for decision making*. Jossey-Bass.
- Roy, D., & Cheatham, A. (2023, July 13). *Central America's turbulent northern triangle*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/background/central-americas-turbulent-northern-triangle>
- Schraufnagel, S. (2011). *Historical dictionary of the U.S. Congress*. Scarecrow Press.
- Sun, J., & Lynch, T. D. (2008). *Government budget forecasting: Theory and practice*. Routledge.
- Taiwan Relations Act. (1979). Pub. L. No. 96-8, 93 Stat. 14.*
- Thurmaier, K. (2016). *State legislative power and fiscal policy: The role of budget offices*. University Press.
- U.S. Const.*
- West, D. M. (2019). *Divided politics, divided nation: Hyperconflict in the Trump era*. Brookings Institution Press.
- Wikimedia. (2020). *US congressional redistricting partisan control 2020*. Wikimedia. <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93350171>

# Epilog

Buku “Kepemimpinan Legislatif dan Dinamika Parlemen: Proses Kebijakan dan Demokrasi” memberikan wawasan komprehensif tentang proses legislatif dan dinamika demokrasi di Amerika Serikat dan Indonesia. Melalui serangkaian paparan dari para ahli dan akademisi terkemuka, buku ini mengupas berbagai aspek penting dalam pembentukan kebijakan dan peran legislatif.

Mark Harkins mengawali diskusi dengan menggambarkan proses pembuatan kebijakan di Kongres Amerika Serikat, yang dirancang untuk mencegah munculnya kekuasaan otoriter. Sistem bikameral dengan House of Representatives dan Senate memberikan keseimbangan antara negara bagian besar dan kecil, serta mencegah dominasi politik elite. Barry Hager menyoroti peran vital kelompok kepentingan dalam proses legislasi di Kongres, meskipun sistem keuangan kampanye yang kompleks dapat menciptakan kesan korupsi dan pengaruh berlebihan dari pihak tertentu. Walter Lohman dan Frank Jannuzi menjelaskan bahwa meskipun eksekutif memiliki peran dominan dalam kebijakan luar negeri, Kongres memegang peran penting dalam pendanaan, kebijakan perdagangan, dan konfirmasi pejabat, dengan keterlibatan konstituen yang sangat memengaruhi kebijakan luar negeri AS.

Darrell West mengidentifikasi tantangan utama bagi demokrasi, termasuk ketimpangan ekonomi, disinformasi, dan polarisasi politik. Ia menekankan pentingnya penyesuaian institusi politik dengan era digital dan menjaga integritas proses demokrasi. J. Mitchell Pickerill menguraikan asal usul bikameralisme dan federalisme di AS yang dirancang untuk melindungi kepentingan negara bagian kecil dan mencegah dominasi mayoritas. Federalisme memberikan otonomi kepada negara bagian, sementara sistem bikameral memastikan representasi yang adil.

Christopher B. Goodman membahas evolusi kekuasaan legislatif di AS, dengan pembentukan *Congressional Budget Office* (CBO) yang memberikan analisis independen dan memperkuat proses anggaran. Scott E. Robinson menjelaskan pentingnya teknik *forecasting* dalam

perencanaan kebijakan, dengan fokus pada analisis berbasis bukti dan pengelolaan ketidakpastian. Kurt Thurmaier menggambarkan evolusi fungsi lembaga legislatif di negara bagian AS sebagai respons terhadap tekanan sosial dan desentralisasi kekuasaan, dengan pembentukan kantor fiskal legislatif yang memberikan layanan analisis independen.

Buku ini diharapkan menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, analis, serta praktisi yang tertarik dengan studi tentang lembaga legislatif, kebijakan publik, dan demokrasi. Terima kasih telah membaca, dan semoga buku ini memberikan wawasan yang bermanfaat dalam memahami proses kebijakan di era modern.

Jakarta, September 2024

Yulia Indahri

# Indeks

## Symbols

10<sup>th</sup> Amendment 5, 26

## A

Abraham Lincoln 10  
accountability 34, 37, 64, 94, 98, 105  
accounting 82, 87, 100, 104, 107  
adaptability 27, 30, 106  
adherence 27  
adjustments 23, 74, 78, 84, 85, 88, 108  
African Americans 18  
agencies 6, 27, 63, 64, 65, 73, 74, 95,  
96, 104, 105, 109  
akselerasi 55  
Alcee Hastings 4  
alcohol 5, 86  
Alice Rivlin 69, 70, 71, 73  
allocative efficiency 101  
amending 5, 31  
amendment(s) 5, 24, 26, 29, 31, 42, 45  
Amerika 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
57, 59, 60, 61, 62  
analytical 65, 75, 90, 92, 94, 95, 109  
analytical services 109  
appointees 68, 70  
approach 4, 6, 9, 14, 28, 30, 32, 34,  
38, 42, 75, 76, 80, 81, 82, 84,  
86, 87, 90, 96, 103, 105, 107,  
108, 110  
appropriations 45, 63, 64, 67, 73, 74,  
110  
Argentina 17  
ARIMA 79, 80, 82, 83, 85  
Articles of Confederation 20  
ASEAN 12, 13

Asian Americans 18  
assessment 35, 85, 86  
authoritarianism 17  
authority(s) 5, 11, 20, 25, 26, 30, 32,  
36, 40, 67, 69  
autonomy 19, 20, 21, 25, 28, 29, 109  
autoregressive 78, 79, 81

## B

backlash 48  
balance 3, 23, 24, 25, 26, 84, 85, 94,  
95, 100, 105, 109  
balanced 2, 24, 70  
balance of power 3, 94, 105  
banking 31  
barons 1  
Bayesian 83  
Beambtenstaat 54  
Belanda 54, 55  
Ben Franklin 3  
berbeda 54, 55, 58, 60  
bicameral 19, 22, 24, 28, 29  
bicameralism 19, 20, 27, 28, 29, 60  
Bill of Rights 5, 26  
bill(s) 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46,  
74  
bipartisan 4, 11, 13, 28, 96, 106  
birokrasi 55  
birokratis 49  
Brazil 17  
briefs 71, 72  
British 20  
budaya 50, 52, 54, 55, 56, 57, 60  
budget 9, 13, 34, 35, 42, 52, 63, 64,  
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  
73, 74, 77, 82, 91, 93, 94, 95,

96, 98, 99, 100, 101, 102, 103,  
104, 105, 106, 109, 110  
Budget Act of 1974 9  
budget analysis 94  
Budget Analysis Division 71, 72  
Budget and Accounting Act 64  
budget autonomy 109  
budgeting process 68, 82, 106  
budget office 93, 94, 95, 98, 100, 101,  
109, 110  
budget shutdown 52  
bureaucrats 41  
Bureau of the Budget 64, 65, 69  
businesses 31, 32

## C

calibration 82  
California 23, 32, 38, 93  
campaign(s) 7, 8, 14, 31, 36, 37, 38  
Canada 12, 14  
Capitol 40, 51  
capture 12, 41, 83  
cara pandang 60, 61  
Carter 92  
cautionary 81  
centralization 30, 36  
challenge(s) 3, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17,  
18, 21, 24, 28, 32, 33, 39, 40,  
71, 75, 76, 81, 87, 88, 89, 93,  
107, 110  
challenging 2, 3, 5, 7, 8, 13, 18, 27,  
31, 33, 38, 39, 43, 77, 79, 80,  
81, 88, 89, 100  
chamber(s) 9, 19, 25, 28, 29, 35, 36,  
39, 40, 44  
chaos 17  
checks and balances 4, 27, 28  
China 11, 12, 13, 14, 41, 107  
civil rights 27  
Civil Rights Movement 26, 27  
Civil War 2, 26, 91, 92  
Clerk 35, 36

climate change 18, 40  
Closed Rule 45  
cloture 45  
collaborate 29, 31, 41, 73  
colonial 21, 91  
colony(ies) 1, 19  
Colorado 93  
committee(s) 2, 6, 7, 8, 9, 36, 42, 43,  
44, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 73,  
74, 96, 110  
compensation 1  
complication 28  
compromise 13, 22, 28, 71  
concept 1, 8, 20, 21, 22, 24, 27, 30,  
31, 38, 78, 96  
concurrent resolutions 42  
Conference Committees 44  
confidence 16, 44, 81  
conflict(s) 8, 16, 17, 18, 20, 31, 32, 66,  
67, 68, 92  
Congress 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,  
21, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 35,  
36, 37, 40, 41, 46, 63, 64, 65,  
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74,  
90, 106, 108, 110  
congressional 7, 9, 11, 12, 13, 25, 31,  
32, 34, 40, 41, 63, 64, 67, 68,  
70, 71, 89, 90, 98, 99, 106, 109  
Congressional Budget Office (CBO) 9,  
34, 35, 63, 68, 69, 70, 71, 72,  
73, 74, 98, 99, 106, 109  
Congressional Power 63  
Congressional Research Service (CRS)  
9, 34, 35  
connection(s) 8, 20, 25, 30, 34, 41  
consensus forecasting 96, 98, 108  
Consent Calendar 45  
conservative(s) 18, 27, 32  
considerations 32, 80, 95, 101, 106  
constituency 7, 24, 29, 39  
constituent-driven 12, 13  
constituent(s) 7, 11, 12, 13, 19, 37,



38, 40  
 constitutional 5, 8, 20, 25, 27, 31, 42  
 constitutional convention 21  
 constitutionally 6, 31, 69  
 contemporary 16, 22, 29, 31, 107  
 contradictions 32  
 Controlled Substances Act 31  
 cooperative 27, 29, 30  
 Cooperative Federalism 26, 27  
 coordination 30, 107  
 correlation 82, 89, 90, 94  
 corrupt 8, 16, 40  
 corruption 7, 8, 36, 41

## D

data 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83,  
 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94,  
 95, 99  
 debate 21, 26, 29, 42, 43, 45  
 decentralization 36  
 deficits 9, 28, 94  
 Delaware 23  
 deliberation 24, 28, 99  
 Deliberation 27, 28  
 democracy 14, 15, 16, 18, 22, 27, 30,  
 98, 99, 100, 102  
 Democrat 35, 39  
 democratic 14, 15, 16, 18, 27, 30, 31,  
 33  
 Democrats 9, 33, 39, 96, 108  
 demografi 49, 57, 58, 59, 60  
 demografis 54, 59  
 demographic change(s) 16, 18, 107  
 Department of State or Agriculture 64  
 Department of Treasury 65, 73  
 desentralisasi 60, 61  
 determinan 49  
 developments 26, 27  
 dialog 50  
 dictatorial role 2  
 digital 18  
 digital technology 15

disagreement 2, 65  
 Disaster relief 31  
 Discharge Calendar 45  
 disinformation 15  
 disproportionate 27, 28  
 dissolved 2  
 distinction 31  
 distortion 16  
 diverse identities 29  
 dominated 21  
 Donald Trump 15, 37  
 dualisme 55

## E

economic growth 66  
 economic structures 29  
 education 5, 12, 17, 27, 34, 41, 86,  
 103, 107, 109  
 education funding 107, 109  
 education policy 31  
 effectiveness 6, 9, 29, 85, 90, 99, 104,  
 105  
 efficiency 4, 9, 67, 77, 99, 100, 101,  
 102, 103, 104  
 eksekutif 55, 56, 58, 62  
 election 13, 16, 17, 24, 26, 37, 39, 44,  
 87, 88, 89  
 election administration 31  
 electoral college 16, 25, 31, 32, 33, 61  
 electors 25, 31, 33  
 Emoluments Clause 8  
 England 1, 2, 3, 19, 20  
 Enumerated Powers 25  
 environment 6, 11, 15, 41, 73  
 environmental 6, 31, 40, 77, 85, 109,  
 110  
 ethics 16  
 ethnic 16, 18  
 E.U. 12  
 Europe 12, 15, 17, 19  
 evolusi 47, 48, 59, 60  
 excessive power 28

exclusive committees 44  
 executive 3, 4, 6, 8, 11, 35, 41, 45, 63,  
 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73,  
 74, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 104,  
 105, 109  
 executive branch(es) 3, 4, 6, 8, 11, 41,  
 45, 64, 65, 66, 92, 95, 109  
 Executive Calendar 45  
 exit interviews 88  
 expenditure limitations 93

**F**

fast track 36  
 federal funding 5, 109  
 federal government 3, 24, 25, 26, 29,  
 32, 66, 92, 103, 107  
 federalism 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29,  
 30, 31, 32, 60  
 federalisme 60  
 federalists 33  
 federal laws 32  
 federal power(s) 5, 26, 30  
 federal system 20, 25, 32  
 filibuster 24, 45  
 Financial Analysis Division 71, 72  
 financial oversight 34  
 fiscal 91, 94, 105  
 fluctuations 80  
 forecasting 72, 75, 76, 77, 78, 81, 82,  
 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,  
 94, 95, 96, 97, 98, 103, 104,  
 105, 106, 108  
 forecasts 69, 71, 81, 89, 93, 95, 96, 97,  
 106, 108, 109  
 foreign affairs 11, 12, 13, 41  
 formal hearings 6, 7  
 foundation 1, 87, 100, 103  
 France 2, 3, 38  
 freedom 1, 5, 68  
 funding 5, 11, 32, 33, 37, 86, 92, 103,  
 107, 109

**G**

gagasan 58  
 General Accounting Office (GAO) 34,  
 35, 64  
 generational 18  
 generations 18  
 Great Compromise 22, 24, 25  
 Great Depression 26  
 Great Society 66  
 gridlock 4, 27, 28

**H**

hak memilih 51  
 health 26, 32, 41, 43, 66, 71, 72, 110  
 healthcare 31, 40, 41, 76, 77, 78, 81,  
 89, 103, 107, 109  
 hierarchy 32, 35  
 historical 1, 2, 11, 14, 17, 22, 26, 30,  
 33, 76, 81, 82, 83, 85, 107  
 history 17  
 House Calendars 45  
 household 110  
 House of Commons 1, 2, 19  
 House of Lords 1, 2, 19  
 House of Representatives 1, 2, 3, 4, 5,  
 6, 9, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 29,  
 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
 42, 43, 45, 46, 51, 62, 64, 68,  
 69, 71, 73  
 houses 19, 24, 32  
 Hungary 17

**I**

Illinois 23, 31, 38, 39, 96  
 imigrasi 54  
 immigration 40, 41, 42  
 impartial 94, 95  
 impeach 2, 35, 39, 62  
 implementation 27, 29, 30, 34, 89,  
 105  
 impoundment 66, 67, 68, 74

imprisonment 1  
 impulsive 28  
 inappropriate 8  
 inconsistent 30  
 incremental 78, 110  
 incumbent 37  
 India 14, 15, 38  
 Indonesia 11, 12, 13, 14, 29, 38, 39,  
 47, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  
 61, 62, 71, 91, 92, 95, 96, 107,  
 109  
 industrialisasi 54, 55, 60  
 industrialization 26  
 inequality 14, 15, 16, 38  
 inklusif 56  
 innovation 18  
 instrumen 49  
 integralistik 54  
 interest(s) 3, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 21,  
 23, 24, 31, 36, 37, 41, 44, 73,  
 101, 102, 105  
 intricacies 78, 90, 108  
 invade 2  
 Iowa 97  
 iron triangle 41

## J

Jeffersonians 33  
 Jepang 54, 55, 57  
 Jerman 55  
 Joe Biden 11, 12, 39, 108  
 Joint Committees 44  
 joint referral 42, 43  
 joint resolutions 42  
 Joint Taxation Committee 9  
 journal 46  
 judicial 4, 6, 35  
 judiciary 1, 4, 5

## K

Kalman 82, 83

Kansas 97, 98  
 kapitalis 55  
 kapitalisme 54, 55  
 keberagaman 56, 60  
 kekerasan 50  
 keragaman 55  
 kerajaan 60  
 kesenjangan ekonomi 49  
 kesenjangan sosial 49  
 ketertiban 49  
 King Charles 1, 2  
 koersif 49  
 kolonialisme 54, 55, 56, 58  
 kompleks 56, 59, 60  
 konflik politik 58  
 konservatif 57, 58

## L

landscape 13, 15, 17, 18, 28, 30, 89,  
 98, 101  
 lansia 57  
 Latin America 15  
 Latinos 18  
 lawmaking 25  
 legal issues 31  
 legalization 86, 108  
 legalized 7, 31, 32, 108  
 legal rationality 101  
 legislation 3, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 27, 28,  
 32, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45,  
 105  
 legislative 1, 3, 4, 7, 9, 10, 28, 29, 34,  
 35, 36, 37, 43, 45, 51, 63, 64,  
 73, 76, 91, 92, 93, 94, 95, 98,  
 100, 101, 103, 107, 109  
 Legislative Calendar 45  
 legislative compliance 34  
 Legislative Counsel's Office 9, 35  
 Legislative Office 35  
 legislative process 4, 7, 28, 36, 37  
 legislative system 3, 29  
 legislators 21, 41, 44, 63, 99, 109

legislature(s) 3, 4, 19, 20, 21, 24, 25,  
26, 29, 30, 32, 38, 39, 91, 92,  
93, 94, 95, 96, 99, 106, 110  
legitimacy 100, 101  
lembaga legislatif 47, 48, 50  
liberal(s) 18, 27, 32, 49  
lobbying 10, 27, 41, 73  
lobbyist 10  
local government(s) 20, 92, 102, 107,  
108

## M

Magna Carta 1  
Maine 31  
majority 11, 16, 18, 21, 24, 30, 31, 34,  
35, 37, 39, 40, 45, 69  
major parties 15, 33, 39  
marijuana 31, 32, 86, 108  
Marxian 49  
Massachusetts 23, 93  
mechanisms 23, 24, 86, 99, 109  
Medicaid 72, 92, 96, 103, 107, 108  
mekanisme pasar 49  
meritokratis 49  
Mexico 12, 14  
military 2, 5, 41  
Ministry of Finance 95, 98, 104  
mistrust 15, 16, 37  
modern party 33  
modifications 6, 23  
monarchy 1, 2, 91  
money 2, 7, 8, 37, 38, 64, 66, 67, 68,  
69, 107, 109  
monitoring 83  
moving average 76, 77  
multiple parties 33  
multivariate 76, 77, 82, 83, 85

## N

narasi 58  
National Conference of State Legisla-

tures 97  
national debt 28, 101, 102, 106  
national government 3, 19, 20, 21, 25,  
27, 28, 31  
Nebraska 29, 31  
negara gagal 49  
negotiations 1, 95, 96  
New Deal 26, 27  
New York 23, 38  
Niposi triangles 41  
Nixon 66, 67, 68, 92  
nonpartisanship 69, 70, 71, 73

## O

objections 46  
observations 83  
obsesi 54  
Office of Management and Budget  
(OMB) 69, 73  
Oliver Cromwell 2, 3, 4  
open rule 45  
oposisi 51, 52, 56  
optimism 17, 18  
order 17, 42, 49  
Oregon 32  
overrepresentation 24, 25, 30  
overrepresented 24, 25, 27, 28

## P

pajak 50, 51, 61  
pandangan 58, 60  
pandemic 77, 86, 106, 108  
Papua Nugini 49  
parliamentary system 1  
Partai Demokrat 51, 60  
Partai Republik 51  
Partisan Committees 44  
pengganggu 49  
Pennsylvania 10, 23  
perang 54, 56  
perbedaan 52, 55, 56, 59, 60, 61

perspective(s) 7, 9, 14, 17, 18, 29, 84,  
 85, 90, 95, 99, 101, 107  
 Philadelphia 21  
 Philippines 17  
 pigeonhole 36  
 piramida 57  
 Pocket veto 46  
 Poland 17  
 polarized 15, 28  
 police power 26  
 policy analysis 85, 87, 101, 107  
 policy implementation 27, 30  
 political 18  
 political campaigns 37  
 political culture 29, 30  
 political elite 3  
 political party(ies) 9, 28, 29, 33, 68,  
 69, 70  
 political rationality 100  
 political safeguards 26, 27  
 politik 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56,  
 57, 58, 59, 60, 61  
 polling 88  
 popular vote 25, 31  
 population 3, 9, 16, 18, 21, 22, 23, 24,  
 38, 39, 52, 77, 78, 85, 88, 103,  
 106, 107, 109  
 power structure 2  
 Prancis 48, 55  
 predict 76, 80, 89  
 predictions 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85,  
 87, 96, 98  
 preservation 28  
 President Johnson 92  
 President Nixon 66, 67  
 priorities 12, 18, 90, 103, 107  
 prioritize 12, 32, 71  
 Private bills 42  
 Private Calendar 45  
 private groups 6  
 priyayi 54  
 Prof. Soepomo 54, 55, 56

progresif 57  
 prohibition 1, 5  
 projections 65, 71, 72, 73, 74, 81, 108  
 proportional 21, 22, 28, 30, 39  
 publications 70  
 Public bills 42  
 purpose(s) 15, 31, 67, 75, 102, 107,  
 108  
 Python 90

## Q

quid pro quo 8

## R

racial 16, 18, 30  
 racism 30  
 random 79, 80  
 rational 82, 100  
 readings 43  
 Reagan 92  
 reapportionment 22, 23  
 reconsideration 46  
 reconstruction 26  
 re-election 24, 39  
 referral(s) 36, 42, 43  
 regional 19, 20, 29, 30  
 registering 38  
 relationship 1, 8, 10, 11, 13, 36, 94  
 religion 1, 5, 17  
 reports 71, 72, 98  
 representation 1, 10, 16, 20, 21, 22,  
 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
 32, 38, 39, 50  
 representatives 22, 23, 24, 29, 36, 37,  
 38  
 Republican(s) 9, 33, 35, 39, 96  
 reserved power(s) 25, 26  
 resolutions 41, 42  
 resource allocation 31  
 revenue 1, 9, 35, 66, 69, 94, 95, 96,  
 97, 98, 99, 103, 107, 108

revenue streams 96, 103  
 revolusi 47, 48, 50  
 revolution 3, 4  
 Rhode Island 23  
 royal governor 1  
 rules committee 42, 43, 45  
 runoff elections 33

**S**

safeguards 5, 27  
 safety 26  
 scrutiny 82  
 sejarah 49, 59, 60, 61  
 select committee(s) 44  
 Senate Calendar(s) 45  
 Senator Feingold 12  
 Senator Leahy 12  
 Senator Menendez 8  
 senators 3, 9, 12, 16, 22, 23, 24, 25,  
 26, 29  
 Senator Wellstone 12  
 sentralisasi 51, 52, 54, 56, 59  
 Sequential Referral 43  
 Single Referral 43  
 slavery 21, 23, 26  
 Slovakia 17  
 social dualism 54  
 social rationality 100, 103, 104  
 solidaritas 59  
 sosial 47, 49, 54, 55, 57, 58, 59  
 South China Sea 12, 13  
 Southeast Asia 12  
 sovereignty 19, 25, 26, 27, 28, 92, 102  
 speaker(s) 35, 36, 39, 42, 43, 44, 69,  
 89  
 speech 1, 5, 7, 38  
 spending 9, 28, 32, 34, 38, 64, 65, 66,  
 67, 68, 69, 72, 73, 74, 77, 78,  
 81, 82, 94, 101, 102, 103, 104,  
 110  
 Split Referral 43  
 sponsor 36, 40, 41, 42

staff 7, 9, 34, 35, 63, 64, 68, 69, 70,  
 71, 72, 95, 104, 105  
 stakeholders 19, 84, 99, 101  
 standing committee(s) 44  
 state formation 47, 48, 49, 50, 51, 54,  
 56, 58, 59  
 state governments 25, 27, 30  
 State laws 32  
 state legislature(s) 3, 24, 26, 30, 32,  
 93, 97  
 state powers 26, 28  
 stock market 77  
 struktural 49, 58  
 suara 50, 51, 60  
 sub-committees 44  
 sumber daya alam 49  
 supremacy 32  
 supreme law 32  
 symbiotic 1

**T**

Taiwan Relations Act 11  
 taxation 25, 50, 92  
 taxes 1, 39, 73, 92, 93, 106, 108  
 tax incentives 29  
 taxpayer 92  
 taxpayer revolts 92  
 technical rationality 101  
 technological 18  
 technology 15  
 terpelajar 54  
 The Committee on Foreign Investment  
 in the United States 11  
 The English Civil War 2  
 The President Pro Tempore of the  
 Senate 69  
 the U.S. Constitution 5, 20, 21, 22,  
 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32  
 third parties 33, 39  
 Thomas Jefferson 3  
 time series 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89,  
 90

trade policy(ies) 11, 20  
traffic 86  
trajectory(ies) 17, 78, 80  
transparency 7, 8, 10, 74, 93, 94, 95,  
96, 97, 98, 99  
transportation 31, 107  
treaties 3, 20, 45  
trend(s) 14, 17, 24, 77, 78, 80, 82, 83,  
84, 85, 86, 89, 90, 105, 107  
trust 35, 36, 37, 38, 43, 99  
Turkey 17  
tyranny of the majority 21, 24

workload 71, 74  
Wyoming 23, 29, 98

## **U**

uncertainty 75, 81, 84, 106  
undemocratic 30  
unemployment 72, 85  
unicameral 20, 29  
Union Calendar 45  
unit root 77, 78, 79  
univariate 76, 77, 78, 79  
Univariate 76  
U.S.–Indonesia 11, 13

## **V**

values 18, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,  
83, 85, 100, 101, 102, 103  
veto 46, 66, 67, 74  
Vietnam War 66  
voters 5, 7, 8, 14, 24, 26, 27, 32, 33,  
39, 88, 89  
voting 1, 5, 16, 26, 27, 38, 39, 46, 96

## **W**

Washington 6, 10, 32, 50, 51, 86  
Washington, D.C. 10, 50, 51  
Watergate 36  
wealthy 16, 37  
Weberian 49  
welfare 66, 92  
Whigs 33

# Biodata Penyunting

Yulia Indahri adalah seorang analis legislatif yang bekerja di Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Yulia menyelesaikan pendidikan sarjana dan memperoleh gelar S.Pd. dari IKIP Jakarta dan memperoleh gelar M.A. dari University of East Anglia, Norwich, UK. Sejak tahun 1999, Yulia telah berkontribusi dalam berbagai penelitian dan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan kebijakan sosial, pendidikan, dan pembangunan.

Sebagai analis legislatif di bidang kesejahteraan rakyat, Yulia telah terlibat dalam sejumlah proyek kajian yang meliputi berbagai topik penting, seperti eradikasi kemiskinan, kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Yulia juga aktif dalam kegiatan pelatihan dan *workshop*, baik di dalam negeri maupun internasional, yang berfokus pada peningkatan kapasitas staf parlementer dan pengembangan kebijakan. Yulia dapat dihubungi di [yulia.indahri@dpr.go.id](mailto:yulia.indahri@dpr.go.id)





# Kepemimpinan Legislatif dan Dinamika Parlemen: Proses Kebijakan dan Demokrasi

Di era demokrasi modern, peran legislatif semakin krusial dalam pembentukan kebijakan dan representasi suara rakyat. Buku ini, yang bersumber dari program pelatihan "*Legislative and Management Training Program 2023*," menghadirkan berbagai perspektif tentang kepemimpinan legislatif dan dinamika parlemen di Amerika Serikat dan Indonesia.

Dikompilasi oleh para pakar dan akademisi terkemuka, buku ini menggali lebih dalam proses pembuatan kebijakan, peran kelompok kepentingan, tantangan demokrasi global, serta dampak formasi negara terhadap peran lembaga legislatif. Buku ini menawarkan wawasan yang luas dan mendalam mengenai bagaimana sistem legislatif bekerja di kedua negara, serta interaksi yang kompleks antara elemen-elemen di dalamnya.

Didesain untuk menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, analis, praktisi, serta siapa pun yang tertarik dengan studi tentang lembaga legislatif, kebijakan publik, dan demokrasi, buku ini mengajak pembaca untuk memahami lebih jauh kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sehat dan efektif.

ISBN 978-602-8722-65-0 (PDF)



9 786028 722650